



LAPORAN AKHIR KERJA
PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Bismillahirrahmannirrahim,
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Yang Terhormat **Gubernur Kalimantan Timur, Wakil**
Gubernur Kalimantan Timur, (atau
yang mewakili),

Yang Terhormat **Ketua, Wakil Ketua, serta Anggota**
DPRD Provinsi Kalimantan Timur,

Yang Kami hormati **Sekretaris Daerah Provinsi**
Kalimantan Timur, Asisten Setda.
Prov. Kaltim, beserta Jajarannya.

Yang Kami hormati **Sekretaris DPRD, Tim Ahli,**
Kelompok Pakar, Tenaga Ahli,
Jajaran Struktural dan Staff
Sekretariat DPRD Provinsi
Kalimantan Timur,

Hadirin Sekalian yang kami hormati,

Pada kesempatan yang berbahagia ini, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, hidayah, jasmani dan rohani yang sehat, sehingga kita semua mampu menghadiri dan mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Akhir Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Timur Pembahas Raperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Povinsi Kalimantan Timur.

Dalam kesempatan ini kami selaku PANSUS pembahas Raperda Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Povinsi Kalimantan Timur, ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Gubernur Kalimantan Timur yang telah setuju dan sepaham serta bersedia untuk membahas Raperda ini.

Serta ucapan terimakasih dari sanubari yang paling dalam kepada seluruh anggota PANSUS, Sekretaris DPRD, Tenaga Ahli, Jajaran Sekretariat DPRD, dan Staf PANSUS yang telah mencurahkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membantu dan mendukung kelancaran pembahasan Raperda ini.

Pimpinan Sidang Dewan Yang Terhormat dan Hadirin Yang Berbahagia,

Pada Rapat Paripurna Ke-6 DPRD Provinsi Kalimantan Timur masa sidang ke-I hari Rabu tanggal 10 Maret 2021, DPRD Provinsi Kalimantan Timur sepakat membentuk Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dengan susunan PANSUS sebagai berikut :

Ketua	: DR. Sarkowi V. Zahry, S.Hut.,SH.,MM.,M.Si.,M.Ling	(F-Golkar)
Wakil Ketua	: H. Saefuddin Zuhri, SE.,MM.	(F-Demokrat-Nasdem)
Anggota	: 1. H. Hasanuddin Mas'ud, S.Hut.,ME	(F-Golkar)
	2. Sapto Setyo Pramono, ST.,MT	(F-Golkar)
	3. Veridiana Huraq Wang, S.Pd.,MM	(F-PDI-P)
	4. Ananda Emira Moeis, S.Sn	(F-PDI-P)
	5. H. Baba	(F-PDI-P)
	6. Ir. H. Bagus Susetyo, SE	(F-Gerindra)
	7. H. Akhmed Reza Fachlevi, S.Sos	(F-Gerindra)
	8. Baharuddin Demmu, S.Pi.,M.Si	(F-PAN)
	9. Nasiruddin, SH	(F-PAN)
	10. Syafruddin, S.Pd	(F-PKB)
	11. Sutomo Jabir, ST.,MT	(F-PKB)
	12. SitiR izky Amelia, SE.,MM.,Ak.,CA	(F-PPP)
	13. H. Ali Hamdi ZA, S.Ag	(F-PKS)

Pimpinan Sidang Dewan Yang Terhormat dan Hadirin Yang Berbahagia,

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengelola barang milik daerah, masih banyak penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam mengelola barang milik daerah, seperti halnya : Penelantaran Aset Daerah, Penyalahgunaan kewenangan dalam pencabutan hak yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah atas hak pemakaian barang milik daerah, Menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi yang mana dapat merugikan daerah serta kepentingan masyarakat.

Pengelolaan Barang Milik Daerah harus dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Dalam pelaksanaan mengelola aset daerah, yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah dalam segi perencanaan aset, pengadaan aset, dan pengawasan aset.

Dalam penyusunan Raperda, perlu diperhatikan beberapa asas-asas pengelolaan barang milik daerah adalah sebagai berikut : Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, pengelola barang dan Gubernur/Bupati/Walikota sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing; Asas kepastian hukum, yaitu Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara. Asas transparansi, yaitu Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi,

golongan dan rahasia negara; Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang milik negara/daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal;Asas akuntabilitas, yaitu Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca Pemerintah Daerah.

Pimpinan Sidang Dewan Yang Terhormat dan Hadirin Yang Berbahagia,

Dengan disusunnya Raperda Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur merupakan waktu yang tepat untuk mengatur dan mengelola secara transparan dan akuntabel seluruh Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka PANSUS telah melakukan pembahasan, kajian/telaahan dan konsultasi dengan pihak terkait sejak PANSUS ini dibentuk secara efektif.

Perlu diketahui bersama bahwa sejak dibentuknya PANSUS Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi Kalimantan Timur, PANSUS telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti rapat-rapat internal dan rapat dengan OPD dan pihak-pihak terkait, serta melaksanakan kunjungan kerja dalam dan luar daerah dalam rangka menggali informasi dan menerima masukan-masukan untuk memperkaya materi Raperda ini. Adapun

kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan PANSUS sebagai berikut :

1. Rapat Dengar Pendapat bersama BPKAD Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membahas tentang pemaparan data terbaru seluruh Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur. RDP dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021 pukul 14.00 Wita – Selesai bertempat di lantai 1 Gedung E DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
2. Rapat Konsultasi dengan BPK RI perwakilan Kalimantan Timur membahas tentang hasil pemeriksaan BPK RI terhadap seluruh aset-aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Rapat Konsultasi dilaksanakan pada hari Senin tanggal 5 April 2021 bertempat di Kantor BPK RI di Jl. M. Yamin Samarinda.
3. Kunjungan Kerja Pansus ke Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri dalam rangka konsultasi terkait alur pembentukan Raperda Barang Mlik Daerah dan mekanisme tata kelola Barang Milik Daerah. Kunjungan tersebut di laksanakan pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 di ruang rapat Lantai 12 gedung Kemendagri.
4. Rapat Internal Pansus BMD membahas terkait evaluasi kerja pansus dan menyusun agenda kerja pansus selanjutnya. Rapat internal tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 pukul 20.30 Wita di Ruang Rapat Pimpinan Lantai 2 Gedung E.
5. Melakukan Rapat Dengar Pendapat bersama seluruh BUMD Provinsi Kalimantan Timur membahas terkait aset dan barang yang dikelola oleh BUMD. Agenda tersebut dilaksanakan pada tanggal 27-28 April 2021 bertempat di Balikpapan.
6. Kunjungan Kerja Pansus ke BPKAD Provinsi DKI Jakarta dan Kantor Penghubung Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta

dengan substansi kunjungan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan aset dan implementasi perda BMD di Jakarta dan menginvestarisir aset-aset Kalimantan Timur di Jakarta.

7. Kunjungan Kerja Pansus ke DPRD dan BPKAD Provinsi Jawa Timur, Kunjungan kerja ke BPKAD Provinsi Sulawesi Selatan membahas terkait studi komparatif terkait pengelolaan aset dan implementasi perda Barang Milik Daerah. Kunjungan Tersebut dilaksanakan pada tanggal 18-21 Mei 2021.
8. Rapat Internal Pansus membahas terkait evaluasi kerja pansus dan menyusun agenda kerja pansus. Rapat tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 pukul 14.00 wita bertempat di ruang rapat lantai 1 gedung E.
9. Kunjungan Kerja Pansus Ke Balikpapan untuk meninjau dan menginventarisir aset Pemerintah Provinsi yang berada di Balikpapan. Kunjungan Tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 Juni 2021.
10. Kunjungan Kerja Pansus Ke Kelurahan Pendingin Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara untuk meninjau lokasi aset Pemprov. Kaltim yang saat ini di kelola PT. Nityasa Prima melalui Skema HGB. Kunjungan tersebut dilaksanakan pada tanggal 10 – 12 Juni 2021.
11. Kunjungan Kerja Pansus ke Kutai Kartanegara untuk meninjau aset SMA, SMK dan Gedung Museum Mulawarman. Kunjungan tersebut dilaksanakan pada 1- 3 Juli 2021
12. Kunjungan Kerja Pansus ke Balikpapan untuk menginventarisir aset di PUSKIB dan aset tanah yang berada di KM 1 dan KM5. Kunjungan tersebut dilaksanakan pada tanggal 1 – 3 Juli 2021

13. Kunjungan Kerja Pansus ke Balikpapan dan ke Kukar untuk menginventarisir aset-aset bersama BPKAD. Kunjungan tersebut dilaksanakan pada tanggal 18 – 20 Agustus 2021.
14. Rapat Dengar Pendapat di Balikpapan bersama BPKAD, Dinas Pendidikan, Dinas PUPR, Biro Perekonomian, dan Biro Umum. Kunjungan/Rapat dilaksanakan pada tanggal 2 – 4 September 2021.
15. Uji Publik Raperda Barang Milik Daerah dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 bertempat di Hotel Platinum Balikpapan.
16. Konsultasi Akhir Raperda Barang Milik Daerah di Kementerian Dalam Negeri RI dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 17 Desember 2021.

Pimpinan Sidang Dewan Yang Terhormat dan Hadirin Yang Berbahagia,

Mengingat pentingnya keberadaan Perda Barang Milik Daerah ini, maka PANSUS sangat memperhatikan prinsip kehati-hatian, dan tidak tergesa-gesa dalam melakukan telaahan, pembahasan dan perumusan Ranperda tersebut.

Oleh karena itu, selama proses pembahasan Raperda BMD ini, PANSUS dan OPD terkait, yakni BPKAD, dan beberapa kunjungan dan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri telah berupaya melakukan sinergisitas untuk menghasilkan Perda yang berkualitas. Pada Akhirnya, Raperda Barang Milik Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat diselesaikan setelah dilakukan sinkronisasi dan konsultasi akhir di Kementerian Dalam Negeri diputuskan untuk dapat disahkan.

Dengan mengingat dan memperhatikan beberapa pertimbangan di atas, maka dalam kesempatan ini perkenankanlah kami, **PANSUS Barang Milik Daerah (BMD) menyampaikan bahwa pembahasan Raperda BMD telah selesai dibahas oleh Tim Pansus. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini pula, PANSUS meminta dalam Rapat Paripurna ini agar dapat mengesahkan Ranperda BMD menjadi Perda.**

Demikianlah Laporan Akhir PANSUS Pembahas Raperda Tentang Barang Milik Daerah (BMD) Kalimantan Timur dalam Rapat Paripurna ke-33 Masa Sidang III Tahun 2021 ini, kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan kami selama melaksanakan pembahasan Raperda hingga menyampaikan Laporan ini.

Atas segala perhatian dan kesabaran dalam mendengarkan Penyampaian Laporan Akhir Kerja PANSUS ini kami ucapkan terima kasih.

Wabillaahi Taufik Wal Hidayah.

Assalaamu'alaikum Warrahmatullaahi Wabarakaatuh.

Selamat Siang dan Salam Sejahtera bagi Kita Semua.

Samarinda, 20 Desember 2021

PANITIA KHUSUS PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG BARANG MILIK DAERAH

Ketua,

(Dr. Sarkowi V Zahry, S.Hut., SH., M.M., M.Si., M.Ling)